



## OPTIMISME TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL TAHUN 2017

Ari Mulianta Ginting\*)

### Abstrak

*Perekonomian pada tahun 2017 diprediksi masih menghadapi kendala eksternal maupun internal yang mempengaruhi perekonomian nasional. Permasalahan eksternal akibat masih berlangsungnya perlemahan pertumbuhan ekonomi global, pengetatan perekonomian Republik Rakyat China (RRC), rendahnya harga komoditas ekspor utama Indonesia serta kebijakan baru Amerika Serikat di bawah presiden Donald Trump yang akan dilantik pada 20 Januari 2017 yang cenderung memproteksi perekonomiannya. Masalah internal diakibatkan oleh rendahnya realisasi penerimaan perpajakan, dampak inflasi energi dan pangan, serta ketimpangan dan pemerataan pembangunan yang belum efektif. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR RI harus melakukan kebijakan yang konkret untuk mengatasi kendala tersebut agar target pertumbuhan ekonomi 2017 dapat tercapai.*

### Pendahuluan

Optimisme terhadap perekonomian Indonesia tahun 2017 muncul karena ada beberapa catatan keberhasilan pemerintah yang telah dicapai pada tahun 2016. Beberapa catatan tersebut antara lain laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 sebesar 5% walaupun pertumbuhan ini lebih rendah dari asumsi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), namun relatif lebih baik dari tahun 2015 yang hanya mampu tumbuh sebesar 4,8%. Dan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 ini jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi negara-negara lain seperti negara-negara *Association of South East Asia Nations*

(ASEAN), bahkan Amerika Serikat maupun Uni Eropa.

Dari sisi inflasi, Pemerintah dapat menjaga inflasi berada pada level 3,1% pada tahun 2016. Angka inflasi ini lebih rendah dibandingkan asumsi inflasi pada APBN-P tahun 2016 sebesar 4%. Nilai tukar rupiah sepanjang 2016 juga berada di level Rp13.307 per USD atau lebih kuat dibandingkan asumsi dalam APBN-P 2016 sebesar Rp13.500 per USD. Fundamental ekonomi disertai berbagai langkah kebijakan ekonomi membuat perekonomian relatif stabil pada tahun 2016. Selain itu, beberapa proyek infrastruktur yang diharapkan dapat menopang perekonomian daerah pun

\*) Peneliti Muda Ekonomi Terapan pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
E-mail: ari.ginting@dpr.go.id

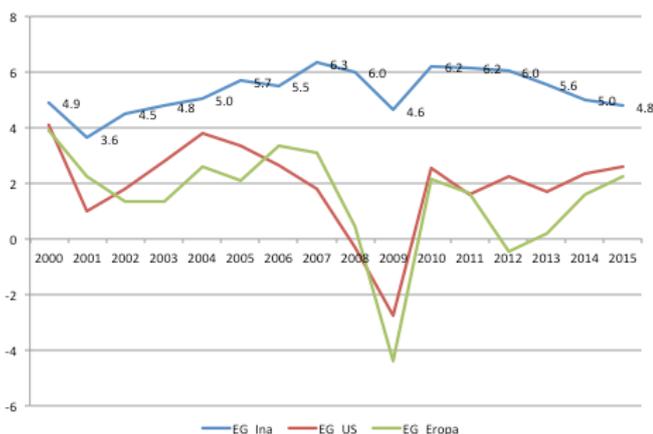


berjalan sesuai jalurnya. Berdasarkan data dan fakta tersebut di atas maka kita sebagai bangsa optimis menghadapi tahun 2017.

Namun di tengah optimisme tersebut, pada tahun 2017 Indonesia langsung dihadapkan pada faktor eksternal dan internal dari perekonomian yang dapat menjadi kendala dan hambatan bagi berlangsungnya roda perekonomian. Untuk itu, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) perlu mencermati beberapa hal. Tulisan ini akan memaparkan mengenai kendala dari faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini.

### Faktor Eksternal Perekonomian Global

Perekonomian Indonesia menghadapi beberapa pengaruh, baik dari dalam maupun luar negeri yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung jalannya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Secara umum, perekonomian global pada tahun 2017 diharapkan membaik, namun ekspektasi masih melemah. Hal ini didasarkan pada tren kondisi pertumbuhan ekonomi global yang masih melemah sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1. Pertumbuhan ekonomi negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan RRT masih memiliki tren yang menurun periode tahun 2010-2016.

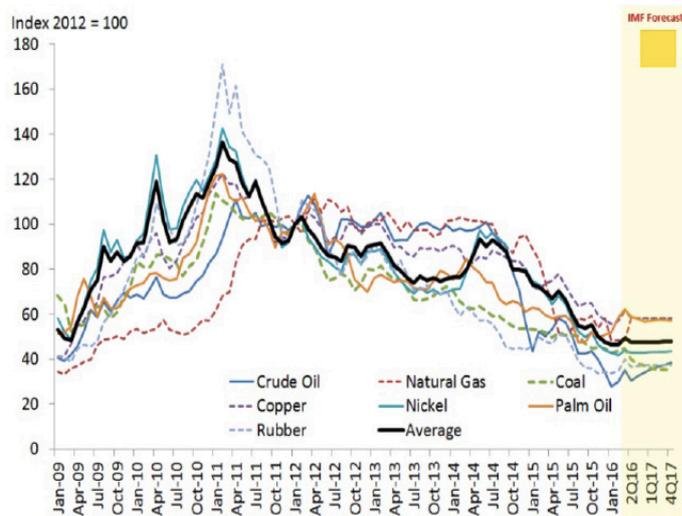


Gambar 1. Tren Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, RRT, AS, dan Eropa Periode 2010-2016

Risiko global yang diperkirakan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 adalah kebijakan ekonomi Pemerintah RRC yang ketat

untuk mengurangi dampak kredit macet yang semakin meningkat. Bagi Indonesia dampak dari kebijakan ini adalah turunnya ekspor Indonesia ke RRC dan berkurangnya aliran dana investasi RRC yang masuk ke Indonesia, karena RRC merupakan tiga besar negara yang berinvestasi di Indonesia. Untuk mendorong peningkatan *Foreign Direct Investment* (FDI) akibat kemungkinan turunnya FDI dari RRT, maka pemerintah perlu mendorong laju pertumbuhan yang tinggi, menjaga stabilitas politik dan keuangan, memacu penyediaan sarana infrastruktur yang lebih baik, serta regulasi dan birokrasi yang ramah terhadap investor untuk menarik investasi dari negara lain masuk ke Indonesia.

Risiko global lainnya adalah harga komoditas ekspor utama Indonesia yang masih melandai dan rendah. Gambar 2. menunjukkan bahwa ekspor utama Indonesia, seperti karet, kelapa sawit, minyak mentah, nikel, dan gas masih mengalami tren penurunan. Rendahnya harga komoditas ini menjadi risiko sendiri bagi ekspor Indonesia yang selama ini masih didominasi oleh *raw material*. Hal ini masih ditambah dengan perlemahan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh negara tujuan ekspor, sehingga kombinasi tersebut berdampak terhadap neraca perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk meningkatkan ekspor, yaitu dengan melakukan ekspor ke negara-negara tujuan nontradisional dan segera melakukan pembenahan struktur ekspor nasional agar dapat memberikan nilai tambah pada *raw material* yang diekspor.



Gambar 2. Perkembangan Harga Komoditas Ekspor Andalan Indonesia

Faktor risiko global lain yang mengancam perekonomian Indonesia adalah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Kebijakan proposal ekonomi yang diajukan oleh Trump yang memangkas pajak bagi kalangan berpenghasilan tinggi tentunya akan mengurangi penerimaan pendapatan Pemerintah AS. Proposal Trump yang cenderung membawa ekonomi AS lebih tertutup akan menyebabkan tingkat ketidakpastian dalam ekonomi AS dan global semakin meningkat.

Proteksi perekonomian lainnya yang akan dilakukan adalah rencana kenaikan tingkat suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat yang akan menjadi faktor risiko global yang mempengaruhi Indonesia, yang pada ujungnya dapat mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk itu, sebaiknya Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) harus menempuh kebijakan moneter yang *prudent* dan konsisten, menerapkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif guna memberikan stimulus kredit dan menjaga momentum pertumbuhan dan harus tetap melakukan intervensi di pasar valas untuk mengendalikan volatilitas nilai tukar.

## Faktor Internal Perekonomian Domestik

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam 1,5 tahun terakhir pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia selain konsumsi rumah tangga adalah belanja pemerintah. Namun, yang menjadi masalah utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rendahnya kinerja penerimaan perpajakan. Pada tahun 2016, berdasarkan data Kementerian Keuangan, meskipun sudah dilaksanakan tambahan penerimaan melalui *Tax Amnesty* diperkirakan masih terjadi *shortfall* perpajakan hingga Rp137,6 triliun dari target APBN tahun 2016. Selain itu, realisasi dana repatriasi yang sudah masuk baru Rp141 triliun atau 14,1% dari target pada periode Juli hingga 29 Desember tahun 2016. Diperkirakan kondisi yang kurang lebih sama terjadi kembali pada tahun 2017. Seperti tahun-tahun sebelumnya, terjadi deviasi yang cukup besar antara target penerimaan pajak dengan realisasi pajak yang berhasil dikumpulkan. Kondisi

ini jelas berdampak terhadap kemampuan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan belanja fiskal untuk menstimulus perekonomian.

Oleh karena, itu Pemerintah bersama dengan DPR RI perlu mengatasi rendahnya penerimaan perpajakan yang telah berlangsung lama. Diperlukan basis data pajak yang lebih luas dan besar. Program *Tax Amnesty* yang telah bergulir berhasil menambah wajib pajak baru sebanyak 562.743 orang. Basis data yang baru diharapkan dapat memperbaiki penerimaan pajak pada tahun 2017.

Masalah internal lainnya adalah dampak inflasi energi dan pangan. Seperti diketahui bahwa tantangan terbesar menjaga inflasi tahun 2017 datang dari sisi harga yang diatur oleh Pemerintah (*administered price*). Pada awal hingga akhir tahun 2017 Pemerintah secara bertahap mencabut subsidi terhadap rumah tangga yang memasang listrik 900 VA dan subsidi pada tabung gas 3 kilogram (kg). Apabila subsidi energi tersebut dicabut, jelas akan menimbulkan kenaikan harga, dan kenaikan harga tersebut pasti menimbulkan peningkatan inflasi pada tahun 2017. Dampak listrik terhadap inflasi nasional menurut Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo adalah sebesar 0,8-1,1%. Hal ini dapat diperburuk lagi dengan fluktuasi harga kebutuhan pokok (*volatile food*) seperti naiknya harga cabai merah keriting dan rawit seperti saat ini. Kombinasi hal tersebut dapat meningkatkan inflasi yang cukup signifikan.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, DPR RI harus lebih melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan Pemerintah, terutama berkaitan dengan kebijakan *administered price* dalam penetapan subsidi listrik dan tabung gas 3 kg yang menjadi wewenang Pemerintah. Kenaikan harga tersebut harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Selain itu, naiknya harga *volatile food* harus menjadi perhatian khusus bagi DPR RI karena fluktuasi harga kebutuhan pokok tersebut ditambah kenaikan *administered price* bidang energi akan mengurangi daya beli masyarakat secara signifikan.

Faktor internal lainnya yang menjadi masalah menahun adalah ketimpangan

dan pemerataan pembangunan yang belum efektif. Pemerintah memiliki instrumen untuk pemerataan kesejahteraan ekonomi, baik antarkelas maupun antarwilayah, yakni APBN. Apalagi volume belanja pemerintah tahun ini mencapai Rp2.000 triliun. Namun sejauh ini, instrumen ini belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari indeks rasio gini Indonesia yang berada pada angka 0,397 atau turun 0,003 dari sebelumnya sejak tahun 2011 yang bertahan pada angka 0,41. Meskipun demikian mengutip data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Indonesia masih berada pada peringkat ke-4 negara paling timpang di dunia. Salah satu indikasinya adalah 1% orang terkaya di negeri ini menguasai 49,3% aset nasional. Apabila ketimpangan ini dibiarkan terlalu lama, dapat berdampak terhadap gesekan di masyarakat yang dapat berujung kepada konflik sosial.

Permasalahan ketimpangan dan pemerataan pembangunan yang belum efektif harus ditangani secara lebih serius. World Bank dalam Laporan Kemiskinan dan Kesejahteraan Bersama memaparkan ada beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu mengatasi ketimpangan, antara lain perlindungan kesehatan untuk semua masyarakat tidak mampu, akses pendidikan bermutu bagi seluruh pelajar, bantuan tunai kepada keluarga miskin, dan perbaikan infrastruktur pedesaan, terutama jalan dan penyediaan listrik.

## Penutup

Perekonomian Indonesia tahun 2017 dihadapkan pada faktor eksternal dan internal yang menjadi hambatan dan dapat menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia. Melihat kenyataan yang ada maka pemerintah bersama DPR RI harus melakukan langkah konkret terhadap beberapa hal tersebut.

DPR RI juga harus dapat memastikan bahwa program dan kegiatan Pemerintah yang telah dan akan dilakukan harus berjalan sesuai dengan koridor untuk mengatasi permasalahan internal. Permasalahan internal tersebut antara lain rendahnya penerimaan perpajakan negara, risiko kenaikan inflasi akibat kenaikan *administered price* listrik, dan tabung gas

3 kg serta *volatile food*, serta permasalahan ketimpangan dan pemerataan pembangunan yang belum efektif. Harapannya, target pertumbuhan 5,3% pada tahun 2017 dapat tercapai dan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## Referensi

- Bappenas, 2016, *Outlook Perekonomian 2017: Tantangan Menghadapi Resiko Global*, Kementerian PPN/Bappenas.
- “Fungsi Fiskal untuk Pemerataan Pembangunan Belum Efektif”, *Kompas*, 6 Januari 2016.
- “Ketika Amnesti Pajak Keluar Jalur?”, *Harian Ekonomi Neraca* Edisi Weekend, 8 Januari 2017.
- “Pembangunan lewat Tiga Sektor”, *Media Indonesia*, 3 Januari 2017.
- “Pemerataan Menjadi Prioritas Pemerintah”, *Kompas*, 5 Januari 2017.
- “Pemerintah Mengubah Strategi dan Kebijakan”, *Kompas*, 3 Januari 2017.
- “Repatriasi Jadi Andalan Dorong Perekonomian 2017”, *Kontan*, 3 Januari 2017.
- “Waspada Dampak Inflasi Energi dan Pangan”, *Media Indonesia*, 9 Januari 2017.
- World Bank, 2016, *Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality*, Washington DC: The World Bank.